



“Sinergitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Penanganan Perkara PHPU tahun 2024 dan Pembangunan Reformasi Birokrasi di MK”



Sekretaris Jenderal MK

Heru Setiawan

VISI & MISI

MAHKAMAH KONSTITUSI

VISI

Mengawal Tegaknya
Konstitusi Melalui
Peradilan Modern dan
Terpercaya

MISI

- 1) Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

“Tranformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi”

Sambutan Ketua MK YM. **Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H** pada Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan MK, tanggal 10 Februari 2022:



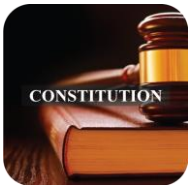
“... visi MK mewujudkan lembaga peradilan modern dan terpercaya setidaknya memiliki dua karakter utama, **pertama**, peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*Information and Communication Technology*), dan **kedua**, peradilan dengan sumber daya manusia yang memiliki *mindset* dan *culture set* yang maju.

Dua karakter dimaksud menjadi potensi sekaligus tolok ukur modern dan terpercaya yang diaktualisasikan dalam sejumlah kondisi, di antaranya:

1. memangkas waktu dalam hal prosedur penanganan perkara;
2. menghindari terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotisme;
3. meluncurkan proses kerja yang efisien efektif transparan dan akuntabel; dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.”



Judicial Administration System (JAS)



*Judiciary
Administration
System (JAS)*



**Permo-
honan
Online**

simpel.mkri.id
NUPP
Digital Transcript

E-BRPK



Jadwal Sidang
Video Conference
Live Streaming
Digital Corner
Digital Verdict
Digital Summary



SIMPP

Digital Mail Delivery
E-Minutasi
Digital Annotation



General Administration System (GAS)



Digital Library



Presensi Online

apps.mkri.id | Dashboard

Health Monitoring | E-Poliklinik
E-SKP | E-News | Visitor Logbook
E-Report | E-Kinerja

Talent Pool | Merit System
Kategori IV (SB)

General Administration System (GAS)

NEW SIKD (e-Office) SIPANDA SIPA



SIBANGALAN

Online Internship | E-Learning

E-Peneliti | e-Journal

SIMJAB | SIMPEG | E-SOP
E-Recruiting

Digital Signature | Multiple DS



Scopus



SIGAPP

Sistem Informasi Gaji PNS dan PPNPN

SIVIKA SAKTI



Balai Sertifikasi Elektronik

SAS E-UMK

E-Mail @mkri.id
Media Monitoring

E-MoU
E-BN
E-Survey
E-Voting
Aman BMN
Agenda Rapat
AR-Puskon



- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Rabu, 23 November 2022 | 16:03 WIB
 Nomor Perkara : 103/PUU-XX/2022
 Amar Putusan : Ditolak
 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Rabu, 23 November 2022 | 15:18 WIB
 Nomor Perkara : 102/PUU-XX/2022
 Amar Putusan : Tidak Dapat Diterima
 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Selengkapnya



PENGUMUMAN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 :: Seluruh persidangan MK dapat diikuti secara live streaming di youtube MK dan di www.mkri.id :: Seluruh informasi persidangan

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

2022 November

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	

Legend: Sidang, Putusan, Keduanya, Tunda, Libur



PENGJUAN UNDANG-UNDANG PILKADA SERENTAK 2020

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDJH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SPAN-LAPORI

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Sabtu, 26 November 2022 | 16:01 WIB
 Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 Yogyakarta, Humas Mki Hakim Konstitusi Saldi Isra Menjadi Pembicara Kunci Dalam Kegiatan Universitas

Sabtu, 26 November 2022 | 13:58 WIB
 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan
 Bali, Humas Mki - Sebagai Wujud Komitmen Dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Negara Yang

Sabtu, 26 November 2022 | 13:54 WIB
 Putusan MK Tafsir Otoritatif atas Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Selengkapnya >>

Sidang Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022. Kamis...

Sidang Pengucapan Putusan. Rabu, 23 November...

Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022. Rabu, ...

Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Rabu, ...

Sidang Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022. Rabu, ...

Sidang Perkara Nomor 108,110/PUU-XX/2022. S...

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

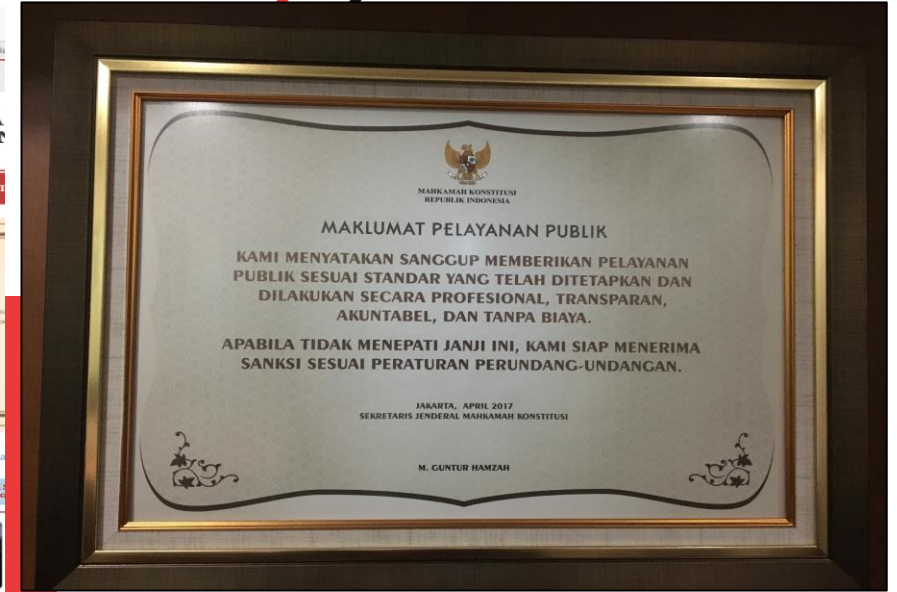
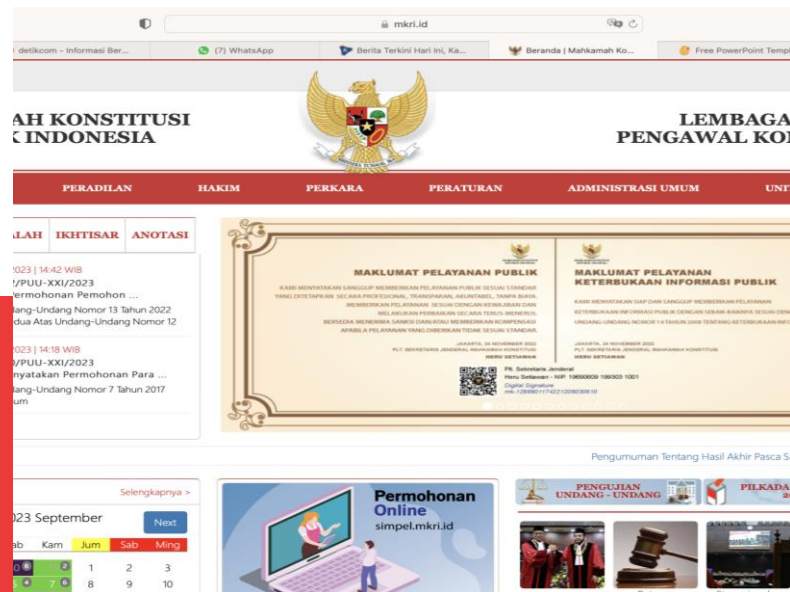
KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

Semua Layanan Publik MK dalam bentuk digital dapat diakses di laman MK: www.mkri.id



Maklumat Pelayanan & Standar Pelayanan MK

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK



Dipublikasikan di Laman MKRI, Signage, dan Ruangan.



CONTOH STANDAR PELAYANAN PUBLIK MK

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon mengajukan konsultasi perihal prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Pemberian Layanan Konsultasi dibagi menjadi 5 kegiatan:
a. Pemohon konsultasi mengisi Formulir Konsultasi;
b. Pelaksana memberikan layanan konsultasi;
c. Konsultasi diinput ke dalam SIMPP;
d. Merekapitulasi konsultasi ke dalam ms. excel;
e. Formulir Konsultasi diarsipkan.

3 JANGKA PENYELESAIAN

10 - 30 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

a. Formulir Konsultasi terisi.
b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

a. Lemari penyimpanan berkas;
b. Meja Permohonan;
c. Komputer;
d. Printer;
e. Stempel.



KOMPETENSI PELAKSANA

a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda I

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;
b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis : 08.30 - 16.00
(di luar jam istirahat pukul 12.00 - 13.00)
Jumat : 08.30 - 16.00
(di luar jam istirahat pukul 11.30 - 13.00)



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Mahkamah Konstitusi)



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
2. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:
a. Kotak saran;
b. Kotak pos;
c. Pesan singkat elektronik (SMS);
d. Surat elektronik (email);
e. Telepon atau fax; dan/atau
f. Media sosial.
3. Pengaduan tersebut paling tidak memuat:
a. Identitas pelapor;
b. Identitas terlapor;
c. Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
d. Pihak yang terlibat;
e. Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Tanggapan pengaduan maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengaduan diterima.
2. Jika materi pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi aduannya maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak menerima tanggapan pengaduan. Pengaduan harus diselesaikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.



5 PRODUK PELAYANAN

Penanganan Pengaduan

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Buku Register Pengaduan atau e-register
2. Komputer
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga.
2. Bisa memegang rahasia.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Inspektur.
2. Koordinator Pengawas Kinerja.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Ditangani langsung oleh atasan petugas secara berjenjang.

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Dajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.
4. Identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Dajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Bebas KKN.
3. Jika diperlukan identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis :
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat :
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)



Persekjen MK Nomor 5.1 Tahun 2022 Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Persekjen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (MK memiliki 26 Standar Pelayanan)

17 RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN*:

- 1. Konsultasi;**
- 2. Kunjungan dan audiensi ke Mahkamah Konstitusi;**
- 3. Pengaduan masyarakat;**
- 4. Permohonan magang KKN/KKL;**
- 5. Permohonan informasi dan dokumentasi;**
- 6. Peliputan ke Mahkamah Konstitusi;**
- 7. Kerja sama perguruan tinggi;**
- 8. Pengajuan permohonan, jawaban, dan penyampaian keterangan;**
- 9. Persidangan;**
- 10. Risalah;**
- 11. Putusan.**
- 12. penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;**
- 13. layanan referensi Perpustakaan;**
- 14. kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi; dan**
- 15. pemanfaatan perangkat Video Conference (Vicon);**
- 16. layanan persuratan pimpinan non perkara; dan;**
- 17. layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah**

***Keterangan: 26 Standar Pelayanan MK tersebut telah diinput ke dalam <https://sippn.menpan.go.id>**

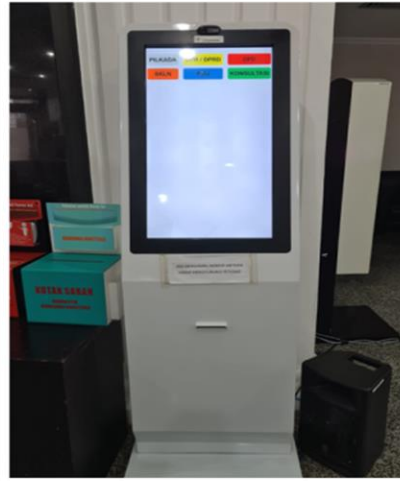


Contoh Fasilitas & Sarpras Pelayanan Publik MK

CONTOH FASILITAS PELAYANAN PUBLIK MK



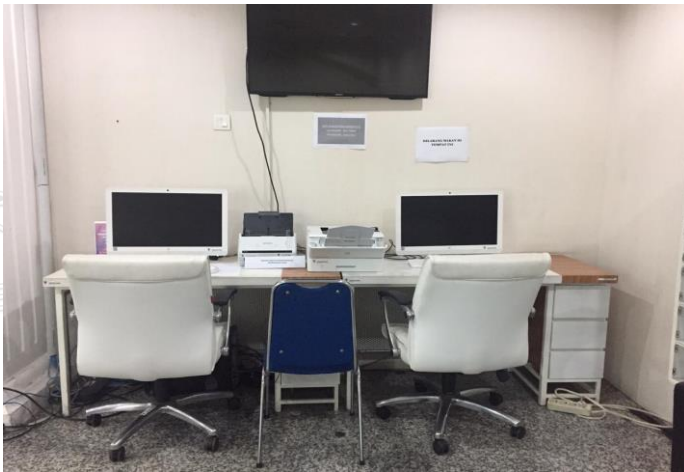
Penerimaan Permohonan



Mesin Nomor Urut Pemohon



Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



Pojok Digital

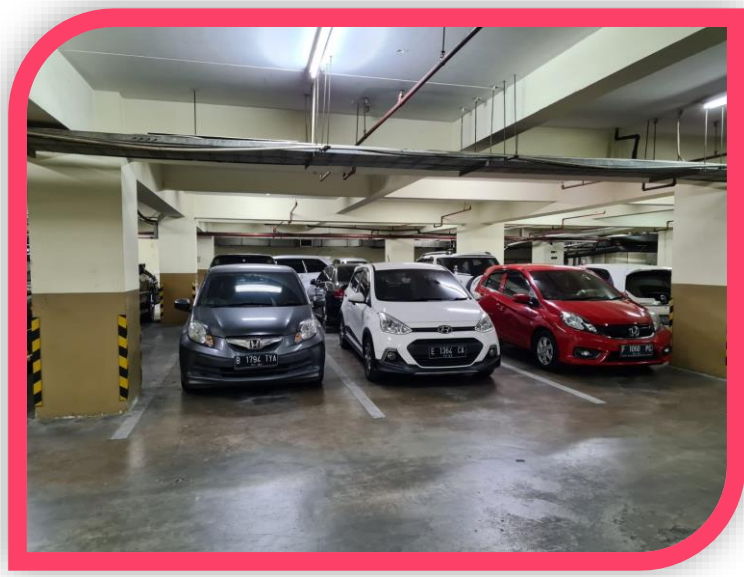


Ruang Tunggu Permohonan

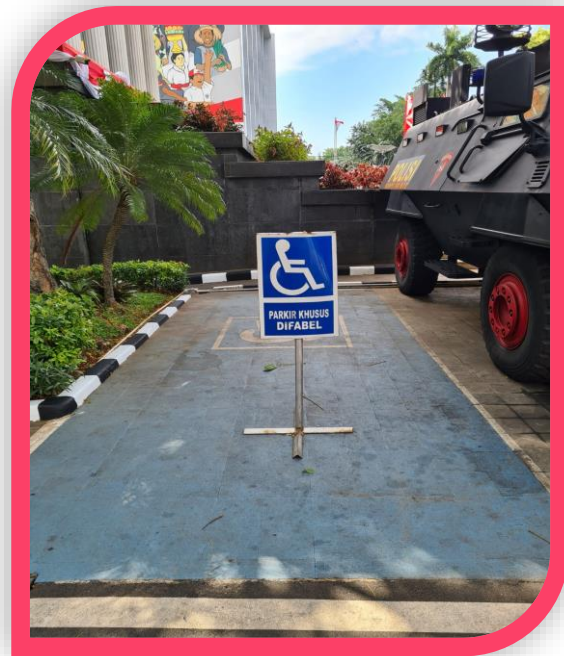


Ruang Sidang Pleno

Parkir Mobil



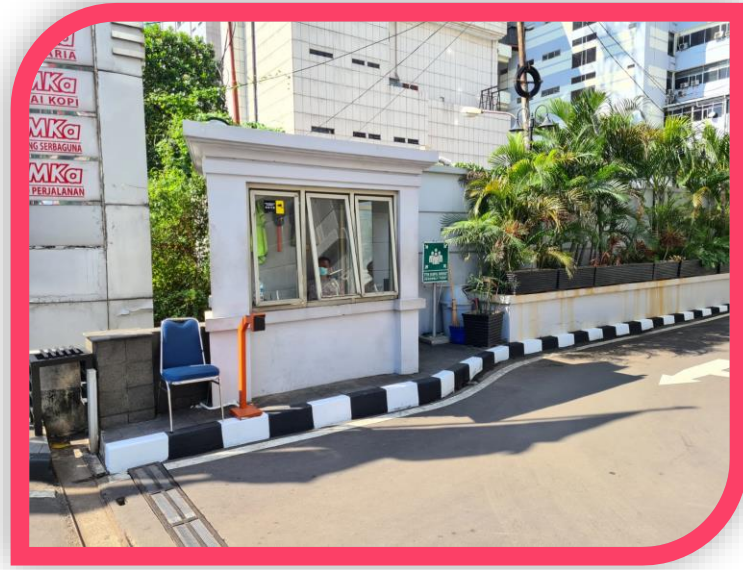
Parkir Khusus Difabel



Parkir Motor



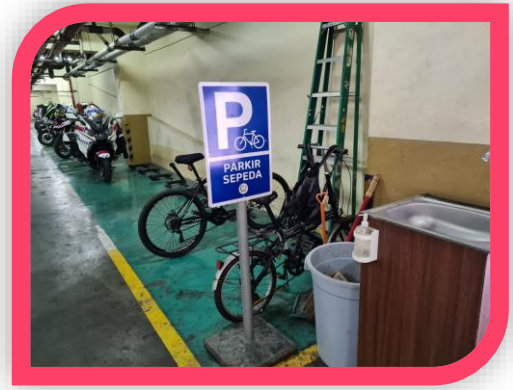
Pos Security



Porta



Parkir Sepeda





- Televisi
- Bahan Bacaan
- Monitor Antrian
- AC
- Air Minum
- Hotspot/Wifi
- Area Merokok
- Ruang Ibadah

Area Merokok



Bahan Bacaan di Ruang Tunggu



Ruang Ibadah



Televisi



Hotspot/Wifi



Air Minum





Kloset Duduk

Wastafel

Toiletres

Air Bersih

Toilet Difabel

Kloset Duduk



Toilet Difabel

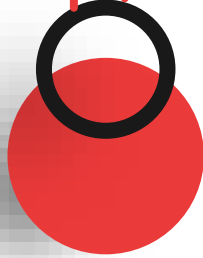
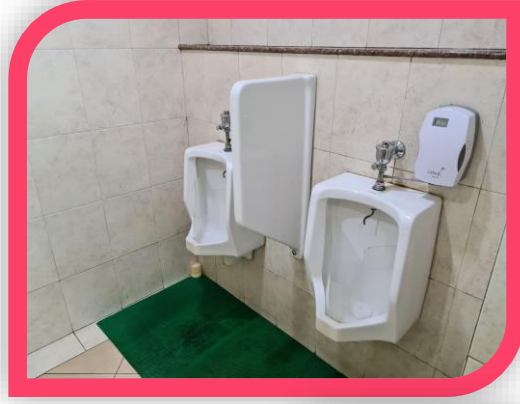


Hand

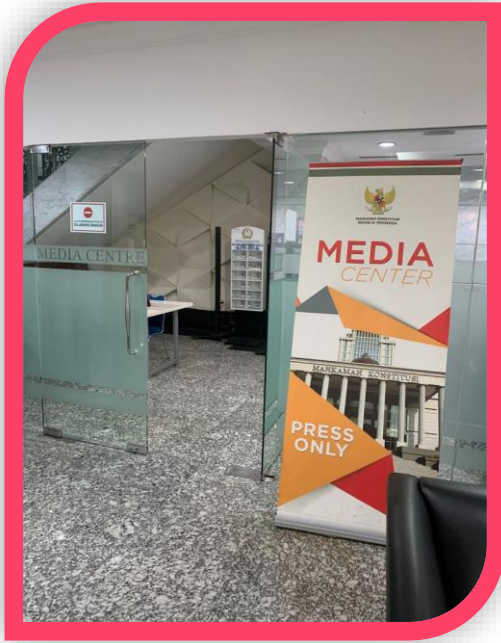
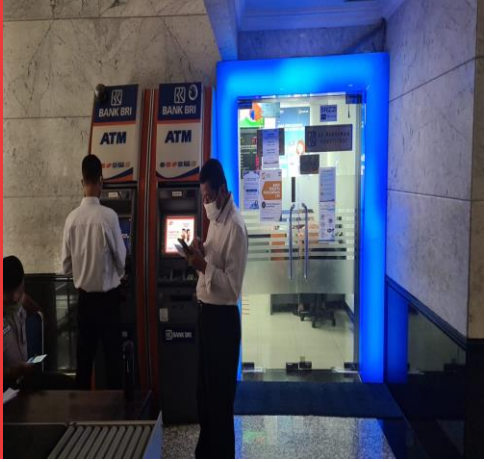
Sanitizer



Pemisahan Toilet Pria dan Wanita



ATM dan Bank



Media Centre

Receptionis

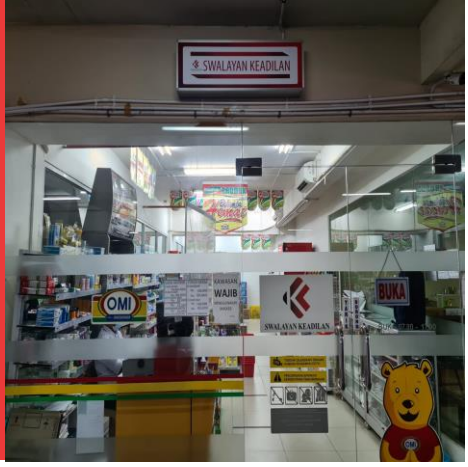


Ambulance



Tempat Swab Antigen
(dalam hal terdapat kewajiban dari Pemerintah untuk melakukan swab antigen di fasilitas publik)

Swalayan Keadilan



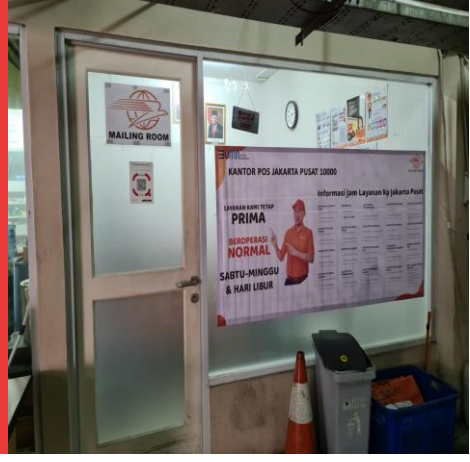
Kantin Keadilan



Ruang Fotokopi



Kantor Pos



Ruang Laktasi



Ruang Laktasi





**PUSAT SEJARAH
KONSTITUSI**



Pelayanan Publik MK

Ramah Kelompok Rentan/Disabilitas



Telah Ditetapkan Persekjen MK Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

- Maksud dari Persekjen 42.1 Tahun 2021:

“Sebagai panduan bagi Mahkamah Konstitusi agar proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas”

- Tujuan dari Persekjen 42.1 Tahun 2021:

- “a. menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi setiap Penyandang Disabilitas yang mengunjungi Mahkamah Konstitusi demi menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- b. memberikan informasi publik mengenai tata cara pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Mahkamah Konstitusi.”**

✓ *Step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda

✓ Toilet khusus difabel

✓ Petugas khusus

✓ Kursi Roda

✓ Tayangan Naskah Putusan saat sidang Pengucapan Putusan

Toilet Disabilitas



Kursi Roda



Tempat Parkir Disabilitas



Kruk/ Crutch



Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda

Toilet khusus difabel

Petugas khusus

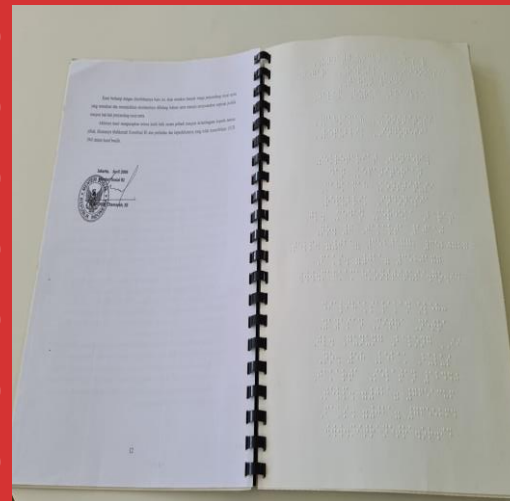
Kursi Roda

Tayangan Naskah Putusan saat sidang Pengucapan Putusan

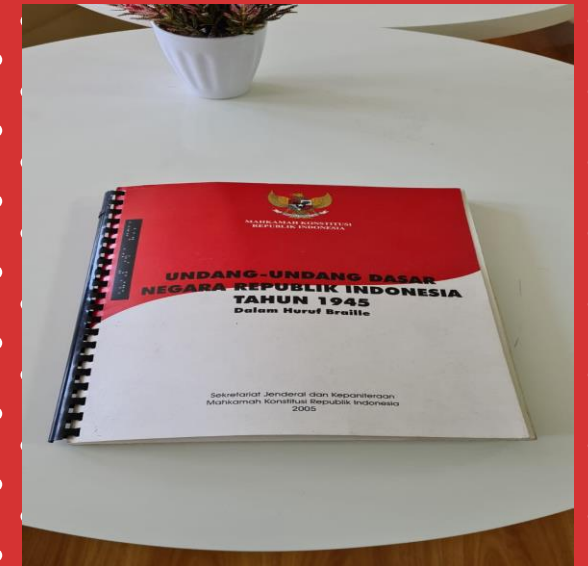
UUD 1945 huruf Braille



UUD 1945 huruf Braille



UUD 1945 huruf Braille



Ambulans



Alat bantu Jalan/ Walker



Lift



✓ **Step lobby/ramp** bagi pengguna kursi roda

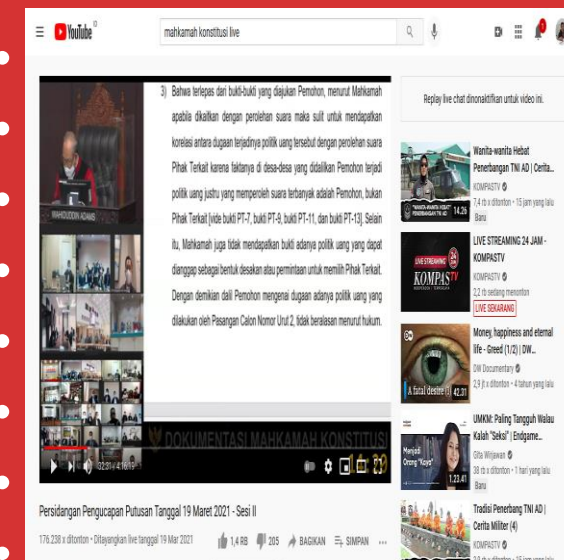
✓ **Toilet khusus** difabel

✓ **Petugas khusus**

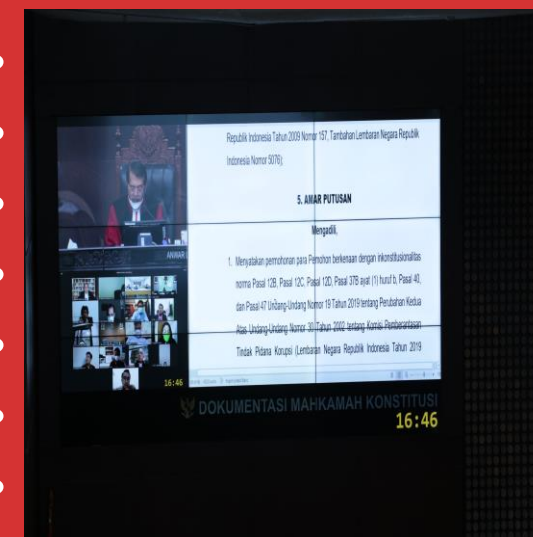
✓ **Kursi Roda**

✓ **Tayangan Naskah Putusan** saat sidang Pengucapan Putusan

Tayangan Naskah Putusan



Tayangan Naskah Putusan





Pengaduan Pelayanan Publik di MK

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK di MK

 2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



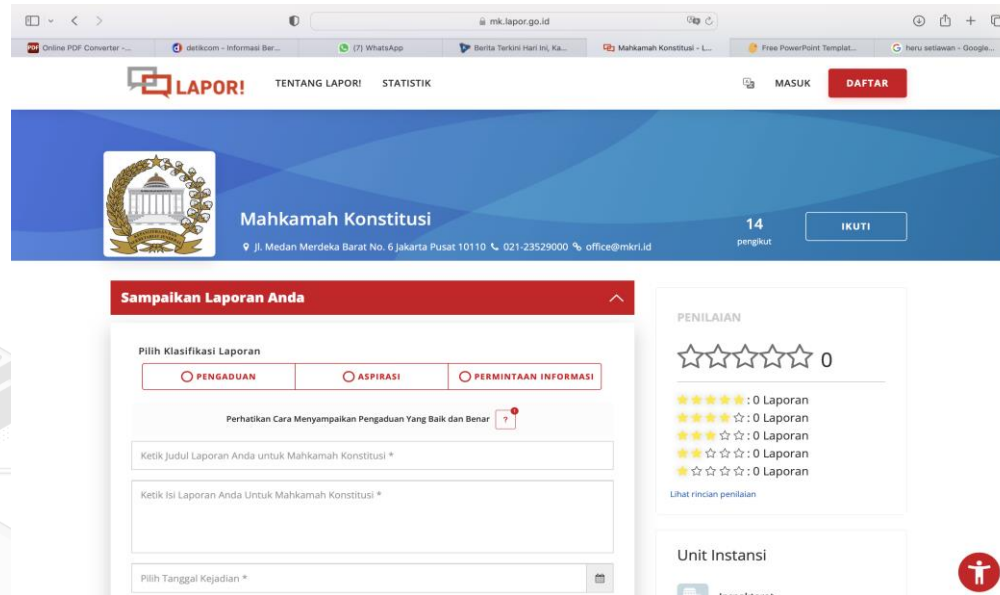
HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



1. Laman www.mkri.id



The screenshot shows the website www.mk.lapor.go.id. The main header features the logo "LAPOR!" and navigation links for "TENTANG LAPOR!", "STATISTIK", "MASUK", and "DAFTAR". Below the header is a banner for the "Mahkamah Konstitusi" (Constitutional Court) with a "14 pengikut" (14 followers) and an "IKUTI" (Follow) button. The main content area is titled "Sampaikan Laporan Anda" (Submit Your Report) and includes a form for reporting. The form has three radio button options for "PENGADUAN" (Complaint), "ASPIRASI" (Aspiration), and "PERMINTAAN INFORMASI" (Information Request). Below these options is a note: "Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar" (Pay attention to the way of submitting complaints that are good and correct). The form fields include "Ketik Judul Laporan Anda untuk Mahkamah Konstitusi *" (Type the title of your report for the Constitutional Court *), "Ketik Isi Laporan Anda Untuk Mahkamah Konstitusi *" (Type the content of your report for the Constitutional Court *), and "Pilih Tanggal Kejadian *" (Select the date of the incident *). To the right of the form is a "PENILAIAN" (Rating) section with a star rating system (0 stars) and a list of reports with their respective ratings: 0 stars, 0 stars, 0 stars, 0 stars, and 0 stars. Below the rating section is a "Unit Instansi" (Institution Unit) dropdown menu with "Inspektoran" selected.

2. Laman www.mk.lapor.go.id

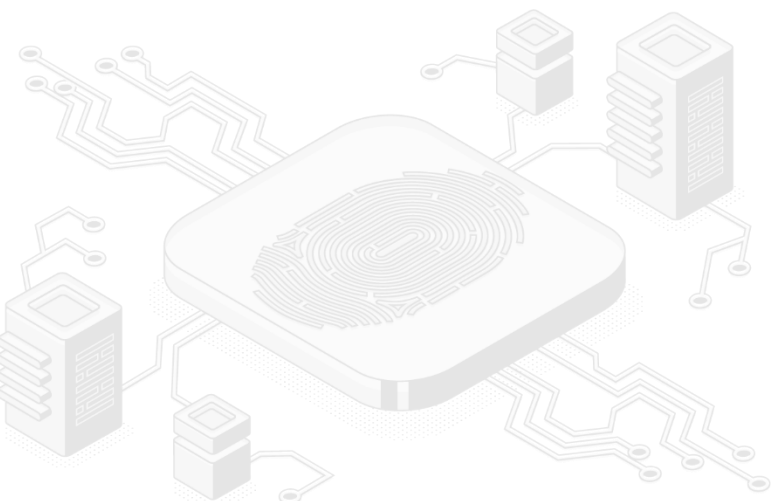


3. Kotak Pengaduan Pelayanan Publik MK



Pra FKP MK-Bawaslu
14 September 2023

Pra FKP MK-Bawaslu



Pra FKP MK-Bawaslu

Draft Identifikasi Masalah & Rekomendasi Berita Acara FKP

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Jumlah ketersediaan tempat/kursi persidangan untuk pendamping Bawaslu perlu ditambah	<ul style="list-style-type: none">- Apabila dimungkinkan agar bisa ditambah kursi untuk Bawaslu di ruang sidang- Aplikasi simpel terkait tempat duduk perlu disesuaikan kebutuhan untuk bawaslu/KPU	2023 – 2024
2.	Apabila persidangan dilaksanakan secara daring (<i>online</i>) terkadang ada gangguan (<i>trouble</i>) jaringan	Untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait infrastruktur jaringan dan kelengkapannya	2023 – 2024
3.	Tidak Ada ruang khusus untuk mengikuti sidang secara <i>online/hybrid</i> di ruang sekretariat Bawaslu (Gd. MK)	Ada tempat dan fasilitas khusus di ruang sekretariat Bawaslu, sehingga bisa digunakan untuk sidang <i>online/hybrid</i> , misal: adanya fasilitas smartboard dan kursi untuk sidang <i>online/hybrid</i>	2023 – 2024
4.	Kurang ketersediaan ruang parkir bagi para pihak	Perlunya ruang parkir khusus untuk pimpinan Bawaslu/KPU	2023 – 2024

Pra FKP MK-Bawaslu

Draft Identifikasi Masalah & Rekomendasi Berita Acara FKP

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
5.	Perlunya <i>ID card</i> ber- <i>barcode</i> /ID khusus Bawaslu/KPU agar memudahkan dalam mobilitas dan identifikasi di lingkungan Gd. MK	Penyediaan ID card khusus Bawaslu/KPU (<i>barcode</i>), catatan: Hal ini pernah dilakukan pada Pilkada 2018	2023 – 2024
6.	Aplikasi Simpel pernah terjadi <i>double</i> registrasi untuk tempat duduk antara Bawaslu dan KPU	<ul style="list-style-type: none">- Ada kontak (PIC) khusus terkait masalah (<i>trouble</i>) IT- Penyempurnaan aplikasi Simpel untuk fitur registrasi tempat duduk	2023 – 2024
7.	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan loket/meja pelayanan untuk para pihak/Bawaslu/KPU perlu ditambah dan loket/meja pelayanan dibedakan antara KPU dan Bawaslu agar berkas tidak tertukar- Ketersediaan tempat khusus untuk verifikasi berkas agar berkas tidak tertukar/tercecer	<ul style="list-style-type: none">- Apabila dimungkinkan ada penambahan loket/meja dan petugas registrasi perkara- Apabila dimungkinkan adanya pemisahan loket/meja pelayanan untuk Bawaslu- Apabila dimungkinkan ada tempat khusus untuk berkas yang diverifikasi	2023 – 2024

**Sekian
&
Terima Kasih**

